



Laporan Kinerja Triwulan II (April, Mei, Juni) Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BADAN MUTU KKP KALIMANTAN TENGAH

SUMMARY

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya keselarasan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja disusun berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi yang dalam road map tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Mutu KKP Palangka Raya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan atas penggunaan anggaran dengan indikator adanya pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik.

Sebagai instansi pemerintah, Badan Mutu KKP Palangka Raya mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan operasional dan administrasi. Laporan ini memberi gambaran menyeluruh kegiatan operasional dan administrasi yang telah dilaksanakan selama Triwulan II Tahun 2025 baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi.

Selama Triwulan II Tahun 2025, Badan Mutu KKP Palangka Raya telah merumuskan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaannya Badan Mutu KKP Palangka Raya telah berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja selama Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Kinerja Badan Mutu KKP Palangka Raya Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70
		2	Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	99
SK. 2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	75
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	75
SK. 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	92
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	71,5
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	100
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Indeks)	87

		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	86
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	85
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	76
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70
		14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	88

Secara keseluruhan, capaian kinerja Stasiun KIPM Palangka Raya mencapai lebih dari 100%. Hal ini dapat dilihat dari seluruh sasaran kegiatan yang telah terealisasi sepenuhnya meliputi 13 indikator kinerja.

Untuk indikator kinerja pengendalian mutu telah tercapai sebesar 120% sampai pada Juni 2025. Indikator kinerja Standardisasi Sistem dan Kepatuhan telah tercapai sebesar 118,71 % dan Indikator Kinerja Tatakelola Pemerintahan yang baik lingkup BKIP, seluruhnya telah tercapai sebesar 108,12%.

Beberapa kendala dan permasalahan pasti menjadi tantangan selama Triwulan II Tahun 2025, namun dengan semangat dan kerjasama yang baik, sehingga seluruh kegiatan tetap dapat terlaksana sesuai target yang diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 kami susun, dengan harapan semoga laporan ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi Badan Mutu KKP Palangka Raya di tahun-tahun berikutnya untuk menjadi lebih baik lagi, serta memberikan banyak manfaat bagi seluruh pembacanya. Semoga keberadaan Badan Mutu KKP Palangka Raya banyak memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.

KATA PENGANTAR

BPPMHKP Kalimantan Tengah yang merupakan satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah terus menjalankan tupoksinya dalam melayani masyarakat. Hal ini sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan demi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Adapun kegiatan yang telah dilakukan tersebut, dapat dilihat melalui laporan kinerja.

Laporan Kinerja Badan Mutu KKP Palangka Raya Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Kami menyadari bahwa di dalam LKj ini sangat mungkin terdapat kekurangan dan kekeliruan, olehnya masukan dan saran yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan LKj ini di masa mendatang.

Tak lupa Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, Semoga LKj Badan Mutu KKP Palangka Raya ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.



Palangka Raya, 05 Juli 2025

Miharjo, S.St.Pi, M.M.

DAFTAR ISI

	Halaman
SUMMARY	1
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Tujuan	10
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	11
1.4. Arah Kebijakan dan Isu Strategis	12
1.5. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1. Visi dan Misi.....	16
2.2. Tujuan.....	17
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	18
2.4. Pengukuran Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja	25
3.2. Analisis dan Evaluasi	28
3.3. Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian KinerjaBadan Mutu KKP Palangka Raya tahun 2025	2
Tabel 2. Indikator dan Target kinerjaBadan Mutu KKP Palangka Raya Triwulan II Tahun 2025	21
Tabel 3. Rekapitulasi capaian kinerjaBadan Mutu KKP Palangka Raya pada tahun 2023, 2024 dan Triwulan II Tahun 2025..	27
Tabel 4. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%) oleh Badan Mutu KKP Palangka Raya.....	30
Tabel 5. Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%) oleh Badan Mutu KKP Palangka Raya.....	34
Tabel 6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%) oleh Badan Mutu KKP Palangka Raya.....	38
Tabel 7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)....	39
Tabel 8. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya.....	42
Tabel 9. Jenis belanja DIPA di UPTBadan Mutu KKP Palangka Raya tahun anggaran 2025 (Per 31 Desember 2024).....	47
Tabel 10. Penyerapan anggaran berdasarkan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025	48
Tabel 11. Rekomendasi dan Hasil tindak lanjut rekomendasi terhadap IKK oleh Badan Mutu KKP Palangka Raya selama Triwulan II tahun 2025.....	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kegiatan terkait pengawasan mutu hasil kealutan dan Perikanan di UPTBadan Mutu KKP Palangka Raya	19
Gambar 2. Peta Strategi BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025.....	19
Gambar 3. Kegiatan pengujian dan pemeriksaan di laboratoriumBadan Mutu KKP Palangka Raya Triwulan II Tahun 2025	21
Gambar 4. Kegiatan penilaian/verifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) oleh tim verifikasi Badan Mutu KKP Palangka Raya di Farm pelaku usaha perikanan di Kota Palangka Raya.....	24
Gambar 5. Dashboard Capaian IKU pada SAPK.....	25
Gambar 6. Nilai SKM Badan Mutu KKP Palangka Raya selama Triwulan II tahun 2025.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya keselarasan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja disusun berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi yang dalam road map tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik.

Sebagai instansi pemerintah, Badan Mutu KKP Palangka Raya mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan operasional dan administrasi. Laporan ini memberi gambaran menyeluruh kegiatan operasional dan administrasi yang telah dilaksanakan selama Triwulan II Tahun 2025 baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi.

Selama Triwulan II Tahun 2025, Badan Mutu KKP Palangka Raya telah merumuskan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaannya Badan Mutu KKP Palangka Raya telah berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja selama Triwulan II Tahun 2025.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawabnya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun Sistem Perkarantinaan Ikan dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sistem tersebut merupakan suatu system yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam rangka memberikan jaminan terhadap produk hasil perikanan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian agar dapat memenuhi persyaratan kesehatan ikan dan aman untuk dikonsumsi manusia.

Pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan diwujudkan dalam menjaga mutu hasil pengolahan produk kelautan dan perikanan serta menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Arah pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah untuk meningkatkan system pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan yang mampu menjawab setiap tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap produk perikanan yang berkualitas dan pelayanan yang prima sehingga diharapkan memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Good Governemance sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 29/2014 tentang system akuntabilitas kerja instansi pemerintah serta PER MEN PAN NO. 53 /2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

1.2. Tujuan

Laporan KinerjaBadan Mutu KKP Palangka Raya Triwulan II Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsiBadan Mutu KKP Palangka Raya selama Triwulan II Tahun 2025 dan sebagai bahan informasi internal serta pihak terkait atas kinerjaBadan Mutu KKP Palangka Raya untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja dimasa mendatang.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

BPPMHKP Kalimantan Tengah merupakan UPT Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan peraturan MEN-KP No. 08 tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sertifikat di tahap Produksi Primer budidaya ; CPIB (pembenihan), CBIB (pembesaran), CPPIB (pakan), CPOIB (obat ikan), CDOIB (distribusi obat ikan) ;
2. Sertifikat di tahap Produksi Primer tangkap ; CPIB (kapal pendinginan), CPIB based on HACCP kapal pembeku, monitoring pembongkaran ikan
3. Sertifikat di tahap Pasca Panen ; SKP di UMKM dan UPI, HACCP di UPI dan supplier, Cara Distribusi Ikan yang Baik
4. Sertifikasi mutu dan keamanan produk (Health Certificate / HC)
5. Pengendalian ketelusuran (traceability) mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
6. Pengendalian importasi produk kelautan dan perikanan konsumsi
7. Pengelolaan manajemen mutu laboratorium (penguji dan acuan) dan jejaring laboratorium
8. Harmonisasi SJMKHKP ; Kerjasama (nasional dan internasional), registrasi ke negara mitra, penanganan kasus mutu dan keamanan hasil Kelautan dan Perikanan
9. Monitoring ; kesegaran, perairan (marine biotoxine, logam berat, dll), mutu dan keamanan hasil Kelautan dan Perikanan di pasar domestik.

BPPMHKP Kalimantan Tengah sebagai sebuah organisasi dipimpin oleh seorang Kepala. Secara umum struktur organisasi Badan Mutu KKP Palangka Raya terdiri dari :

- a. Kepala Badan Mutu KKP Palangka Raya
- b. Kepala Urusan Umum
- c. Kelompok jabatan fungsional

Secara ringkas Struktur Organisasi sebagai mana tercantum pada gambar 1.

Gambar 2. Struktur organisasi dan Tata Kerja Badan Mutu KKP Palangka Raya (Sesuai Permen KP No. 92/2020)

Uraian tugas dari masing – masing bagian organisasi Badan Mutu KKP Palangka Raya antara lain :

- a. Sub Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga ;
- b. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan

1.4. Arah Kebijakan dan Isu Strategis

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Mutu KKP Palangka Raya disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Badan Mutu KKP Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan

memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.

2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun ntar area di dalam wilayah NKRI
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan joint inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

6. Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBK-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBK berbasis digital.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKjBadan Mutu KKP Palangka Raya Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan hal-hal lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang keseluruhannya terdapat dalam perencanaan kinerja.

Dalam perencanaan kinerja harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya visi dan misi, tujuan, sasaran serta indikator dan target kinerja dengan uraian sebagai berikut :

2.1. Visi dan Misi

Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BPPMHKP adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Badan Mutu KKP Palangka Raya sebagai UPT BPPMHKP, menetapkan visi mengacu kepada visi BPPMHKP dalam kegiatan pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan Triwulan II Tahun 2025, yaitu “ Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman terpercaya “

Sebagai penjabaran dalam mewujudkan visi tersebut Badan Mutu KKP Palangka Raya menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan

2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Jenis Agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit ikan.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Badan Mutu KKP Palangka Raya perlu mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara nasional. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas KKP adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional khususnya di wilayah tugas Badan Mutu KKP Palangka Raya dengan sasaran :

1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah pengeluaran/ pemasukan ekspor, impor dan antar area
2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area
3. Menurunnya jumlah kasus penolakan / penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra
4. Meningkatnya Unit pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor
5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasive melalui kajian dan analisa resiko

2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

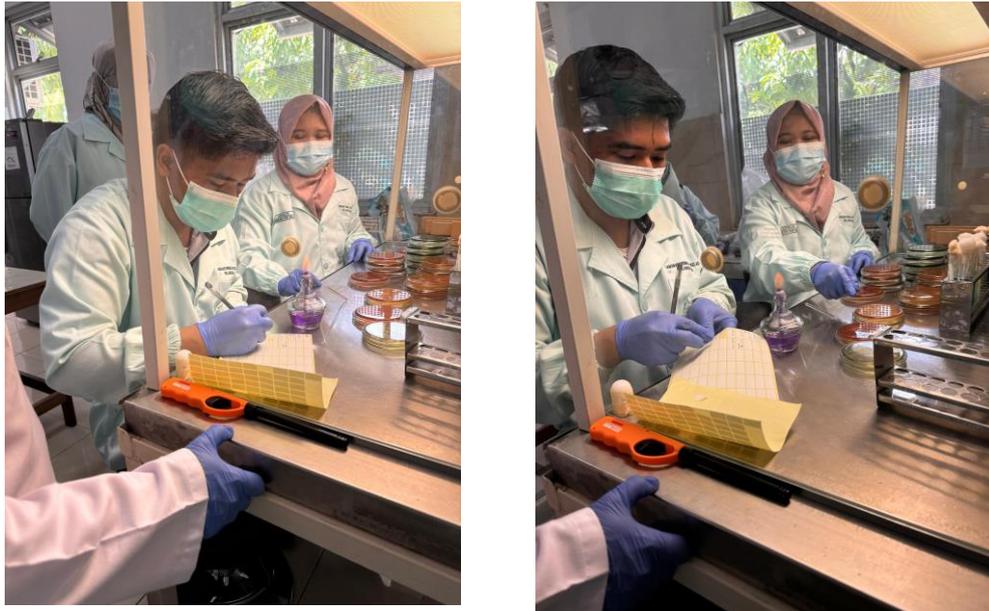
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik.



Tim analis laboratorium penguji Badan Mutu KKP Palangka Raya



Pengujian sampel oleh tim analis.



Pemeriksaan sampel di laboratorium oleh tim Analis
Gambar 1. Kegiatan terkait pengawasan mutu hasil kealutan dan Perikanan di UPT Badan Mutu KKP Palangka Raya

Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, Badan Mutu KKP Palangka Raya telah melakukan menetapkan Sasaran Strategis dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang diselaraskan dengan Sasaran Strategis KKP secara nasional sebagaimana tercantum pada daftar berikut :



Gambar 2. Peta Strategi BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025

Peta strategis BPPMHKP tersebut selanjutnya diturunkan, dengan proses yang disebut cascading, dari eselon III ke eselon IV hingga ke seluruh pegawai Badan Mutu KKP Palangka Raya. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai Badan Mutu KKP Palangka Raya dalam setiap level. Hal ini merupakan keunggulan lain dari penerapan pengelolaan kinerja berbasis BSC. Wujud nyata dari hasil pengelolaan kinerja dapat dirasakan dengan tercapainya sebagian besar target kinerja Badan Mutu KKP Palangka Raya secara keseluruhan pada Tahun 2025.

Dengan terus memelihara semangat perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) maka diharapkan terus ada pembenahan pengelolaan kinerja Badan Mutu KKP Palangka Raya di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan agar visi dan misi Badan Mutu KKP Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat tercapai.

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.



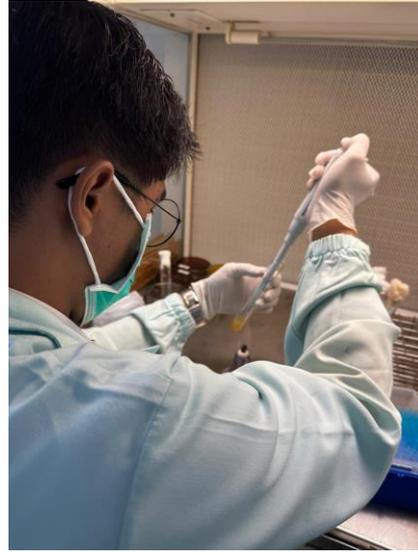
Kegiatan di Laboratorium organoleptik



Kegiatan di Laboratorium bakteri



Kegiatan di Laboratorium virus



Kegiatan di Laboratorium jamur

Gambar 3. Kegiatan pengujian dan pemeriksaan di laboratorium Badan Mutu KKP Palangka Raya Triwulan II Tahun 2025.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Mutu KKP Palangka Raya Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ;

Tabel 2. Indikator dan Target kinerja Badan Mutu KKP Palangka Raya Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70

		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70
SK. 2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	99
		4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	75
SK. 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	75
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	76

		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	88

BPPMHKP Kalimantan Tengah telah menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan Mutu KKP Palangka Raya. Dalam perjanjian kinerja ini terdapat 3 Sasaran Strategis, yang pencapaian realisasinya diukur dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Perjanjian kinerja BPPMHKP tersebut sesuai dengan **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2024** tentang Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2025 yang terdiri dari sasaran-sasaran strategis di mana setiap SS menjadi basis dalam penentuan IKU.





Gambar 4. Kegiatan penilaian/verifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) oleh tim verifikasi Badan Mutu KKP Palangka Raya di Farm pelaku usaha perikanan di Kota Palangka Raya .

2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi}/\text{Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

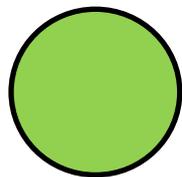
Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1-\text{Realisasi}/\text{Target}))\} \times 100\%$$

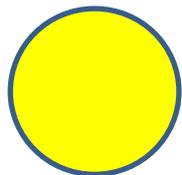
c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

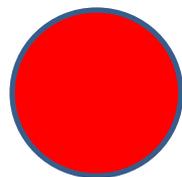
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :



$100 \leq X \leq 120$
(memenuhi ekspektasi)



$80 \leq X \leq 100$
(belum memenuhi ekspektasi)



$X \leq 100$
(tidak memenuhi ekspektasi)

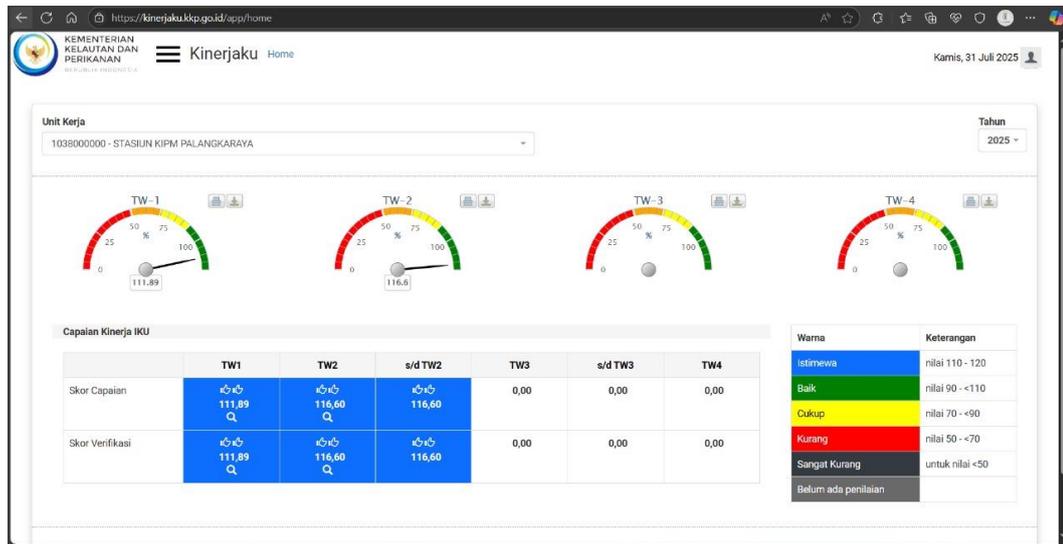
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Capaian kinerja Badan Mutu KKP Palangka Raya Triwulan II Tahun 2025 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 107,75 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 5. Dashboard Capaian IKU pada SAPK

IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-

kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Langkah berikutnya dalam pencapaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator dan analisis hasil capaian indikator. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Berikut hasil rekapitulasi capaian kinerja Badan Mutu KKP Palangka Raya pada Tahun 2022, 2025 dan Triwulan II Tahun 2025 seperti terurai pada tabel berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi capaian kinerja Badan Mutu KKP Palangka Raya pada tahun 2023, 2024 dan Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	REALISASI (%)		
					2023	2024	Tr. II 2025
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70	-	120	120
		2	Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka	70	-	120	120

			Raya (%)				
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	99	-	-	-
SK. 2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	75	-	-	-
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	75	-	-	-
SK. 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	86	94,53	104,85	117,65
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	85	94,87	120	-
		8	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	76	100	100	-
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Indeks)	70	86,61	100,83	108,63
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	88	-	100,98	-
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang	92	100	120	117,65

			Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)				
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	71,5	78,26	105,43	120
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	100	-	-	-
		14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	87	89,56	111,9	102,06

3.2. Analisa dan Evaluasi

Capaian kinerja Badan Mutu KKP Palangka Raya pada kegiatan penjaminan mutu produk perikanan berasal dari satu sasaran strategis, yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan .

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah meningkatnya persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya dari tahun ke tahun. Adapun capainnya kinerja tersebut baru terlaksana sejak adanya pemisahan lembaga dari Karantina Ikan diambil alih oleh Badan Karantina Indonesia.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1

IK 1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)

Kontribusi Badan Mutu KKP Palangka Raya dalam memenuhi Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan lingkup UPT KIPM Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%) oleh Badan Mutu KKP Palangka Raya

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	Realisasi	% CAPAIAN	
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	70%	100%	120%

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur

berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

BPPMHKP Palangka Raya saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

- c. Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Adapun berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan di Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Inspeksi Sertifikasi CBIB di Desa Handiwung dan Desa Basarang Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025 di kolam pembudidaya ikan patin.



2. Inspeksi Sertifikasi CBIB di Desa Sei Tatas, Desa Basungkai, Desa Bandar Raya dan Desa Handel Bajang Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025 di kolam pembudidaya ikan patin.



- Inspeksi Sertifikasi CBIB di Desa Saka Mangkahai dan Desa Sei Pitung Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 di kolam pembudidaya ikan patin.



- Inspeksi Sertifikasi CBIB di Desa Mendawai, Desa Kartamulia dan Desa Padang Kabupaten Sukamara yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2025 di kolam pembudidaya ikan nila dan patin..



- Inspeksi Sertifikasi CBIB di Desa Sungai Bundung dan Desa Sungai Pasir Kabupaten Sukamara yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 Juni 2025 di tambak pembudidaya ikan bandeng dan udang vannamei..



- Inspeksi Sertifikasi CBIB Tambak Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara di Desa Sungai Pasir Kabupaten Sukamara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025.



Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2

IK 2. Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)

Kontribusi Badan Mutu KKP Palangka Raya dalam memenuhi Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan lingkup UPT KIPM Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%) oleh Badan Mutu KKP Palangka Raya

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	Realisasi	% CAPAIAN
SK 1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan	2	Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM	70%	70%	120%

			Palangka Raya (%)			
--	--	--	-------------------	--	--	--

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha industry pengolahan ikan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap unit pengolahan ikan yang diterbitkan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius)

3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Adapun berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan di Sektor Produksi Pasca panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan sertifikat SKP di Unit Pengolahan Ikan PMEFS pada tanggal 21 Mei 2025 yang terbit pada Mei 2025 dengan jumlah SKP 10 Sertifikat :

12	4	PERUSAHAAN PT. BAKULAN BAMBANG POKOLU, BANGKALU, JAWA BARU	Miko Satrio	Wahyudin	30072	PT/RSK/2025/000001	08-08-2025	A	Jl. Mawang No.04 RT. 003 RW. 003, Desa Pambakutan, Kecamatan Wana, Kabupaten Bangkulu, Kalimantan Tengah
12	10	PERUSAHAAN PT. BAKULAN BAMBANG POKOLU, BANGKALU, JAWA BARU	Priska Pratiwi	Prasasti Yulia Jusaidi Putri Pratiwi	30072	PT/RSK/2025/000007	21-08-2025	A	Jl. Mawang No.04 RT. 003 RW. 003, Desa Pambakutan, Kecamatan Wana, Kabupaten Bangkulu, Kalimantan Tengah
12	11	PERUSAHAAN PT. BAKULAN BAMBANG POKOLU, BANGKALU, JAWA BARU	Kiki Satrio	Pratiwi Satrio	30071	PT/RSK/2025/000004	21-08-2025	A	Jl. Mawang No.04 RT. 003 RW. 003, Desa Pambakutan, Kecamatan Wana, Kabupaten Bangkulu, Kalimantan Tengah
12	12	PERUSAHAAN PT. BAKULAN BAMBANG POKOLU, BANGKALU, JAWA BARU	Samuel Satrio	Pratiwi Satrio	30070	PT/RSK/2025/000003	21-08-2025	A	Jl. Mawang No.04 RT. 003 RW. 003, Desa Pambakutan, Kecamatan Wana, Kabupaten Bangkulu, Kalimantan Tengah
12	13	PERUSAHAAN PT. BAKULAN BAMBANG POKOLU, BANGKALU, JAWA BARU	Muhik Mulyani Satrio	Wahyudin	30068	PT/RSK/2025/000002	21-08-2025	A	Jl. Mawang No.04 RT. 003 RW. 003, Desa Pambakutan, Kecamatan Wana, Kabupaten Bangkulu, Kalimantan Tengah
12	14	PERUSAHAAN PT. BAKULAN BAMBANG POKOLU, BANGKALU, JAWA BARU	Samuel Satrio	Pratiwi Satrio	30068	PT/RSK/2025/000005	21-08-2025	A	Jl. Mawang No.04 RT. 003 RW. 003, Desa Pambakutan, Kecamatan Wana, Kabupaten Bangkulu, Kalimantan Tengah
12	15	PERUSAHAAN PT. BAKULAN BAMBANG POKOLU, BANGKALU, JAWA BARU	Hani Marlina Satrio	Pratiwi Satrio	30067	PT/RSK/2025/000006	21-08-2025	A	Jl. Mawang No.04 RT. 003 RW. 003, Desa Pambakutan, Kecamatan Wana, Kabupaten Bangkulu, Kalimantan Tengah
12	16	PERUSAHAAN PT. BAKULAN BAMBANG POKOLU, BANGKALU, JAWA BARU	Muhik Satrio	Pratiwi Satrio	30066	PT/RSK/2025/000008	18-08-2025	A	Jl. Mawang No.04 RT. 003 RW. 003, Desa Pambakutan, Kecamatan Wana, Kabupaten Bangkulu, Kalimantan Tengah
12	17	PERUSAHAAN PT. BAKULAN BAMBANG POKOLU, BANGKALU, JAWA BARU	Dharmas Satrio	Pratiwi Satrio	30066	PT/RSK/2025/000009	08-08-2025	A	Jl. Mawang No.04 RT. 003 RW. 003, Desa Pambakutan, Kecamatan Wana, Kabupaten Bangkulu, Kalimantan Tengah
12	18	PERUSAHAAN PT. BAKULAN BAMBANG POKOLU, BANGKALU, JAWA BARU	Adnan Satrio	Pratiwi Satrio	30067	PT/RSK/2025/000009	08-08-2025	A	Jl. Mawang No.04 RT. 003 RW. 003, Desa Pambakutan, Kecamatan Wana, Kabupaten Bangkulu, Kalimantan Tengah



2. Telah diterima permohonan rekomendasi dari Dinas Perikanan Kota Palangka Raya sebanyak 1 UPI dengan 8 ruang lingkup SKP, telah dilakukan verifikasi terhadap rekomendasi dan dilakukan perbaikan oleh UPI tersebut dan siap untuk dilakukan supervisi / verifikasi lapangan tanggal 25 s/d 26 Juni 2025 dan sertifikat SKP sudah diterbitkan tanggal 30 Juni 2025.



1	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Amplang Ikan	Fish Amplang	39717	37649/62/ SKP/LN/ VI/2025	30-06-2025	A	Jl. Merak No.04 RT. 001 RW. 023, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
2	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Payak Udang	Shrimp Crackers	39716	37648/62/ SKP/KR/ VI/2025	30-06-2025	A	Jl. Merak No.04 RT. 001 RW. 023, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
3	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Krupuk Talang Ikan	Fish Bone Cracker	39715	37647/62/ SKP/LN/ VI/2025	30-06-2025	A	Jl. Merak No.04 RT. 001 RW. 023, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
4	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Krupuk Ikan Goreng, Krupuk Udang Goreng	Fried Fish Crackers, Fried Shrimp Crackers	39714	37646/62/ SKP/KR/ VI/2025	30-06-2025	A	Jl. Merak No.04 RT. 001 RW. 023, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
5	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Stik Ikan	Fish Stick	39615	37547/62/ SKP/KR/ VI/2025	26-06-2025	A	Jl. Merak No.04 RT. 001 RW. 023, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
6	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Keripik Ikan	Fish Chips	39614	37546/62/ SKP/LN/ VI/2025	26-06-2025	A	Jl. Merak No.04 RT. 001 RW. 023, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
7	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Krupuk Ikan	Fish Crackers	39613	37545/62/ SKP/LN/ VI/2025	26-06-2025	A	Jl. Merak No.04 RT. 001 RW. 023, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
8	PRAMESTI MALIMA ENERGI FOKUS SEJAHTERA (PMEFS)	Krupuk Kulit Ikan	Fish Skin Crackers	39612	37544/62/ SKP/LN/ VI/2025	26-06-2025	A	Jl. Merak No.04 RT. 001 RW. 023, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3

IK 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)

Kontribusi Badan Mutu KKP Palangka Raya dalam memenuhi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup UPT KIPM Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%) oleh Badan Mutu KKP Palangka Raya

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	Realisasi	% CAPAIAN
SK 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	85%	100%	117,65%

Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP. Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang di dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 100% dengan target 85% dan capaiannya adalah 117,65%, dengan capaian sebagai berikut :

- 1 Rapat bulanan pembahasan kinerja awal tahun pada tanggal 9 Januari 2025



- 2 Rapat bulanan pembahasan administrasi dan teknis perkantoran pada tanggal 20 Maret 2025



3 Rapat pembahasan dan evaluasi kinerja kantor pada tanggal 10 Juli 2025



MONVEPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

ALTER SAMPAI DENGAN 1 (100%)

NO	KODE KPI	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DIFFERENS SPK (PENGANGKAM)	NILAI AKHIR (NILAI BOKAL/KEBERHA BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN 31.000	PENYERAPAN ANGGARAN	SELISIA KONTRAKTUAL	PENYELASAAN TEBERAK	PENGUCILAN UP DAN TUP	CAPIAN OUTPUT	CAPIAN OUTPUT				
1	043	032	049057	STASIUN KARBANTINA RANA PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	Nilai	100,00	81,51	98,75	0,00	0,00	100,00	100,00	77,05	80%	0,00	96,31	
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25					
					Nilai Akhir	10,00	12,30	19,75	0,00	0,00	10,00	25,00					
					Nilai Aspek		93,99			99,38		100,00					

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2

IK 12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)

Kontribusi Badan Mutu KKP Palangka Raya dalam memenuhi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup UPT KIPM Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	Realisasi	% CAPAIAN
SK 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	12 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)	76%	100%	120%

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya adalah 100% dengan target 76% dan capaiannya adalah 120%. Frekuensi perhitungan indikator ini adalah setiap triwulan.

Adapun berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Telah dilakukan penginputan SIRUP dan perbaikan SIRUP sesuai dengan kondisi terbaru sesuai kebijakan penghematan anggaran pemerintah RI pada tanggal 22 Maret 2025.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 14

IK 14. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

Kontribusi Badan Mutu KKP Palangka Raya dalam memenuhi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup UPT KIPM Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	Realisasi	% CAPAIAN
SK 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	14 Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)	88	89,81	102,06%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM),

masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT SKIPM Palangka Raya (Nilai) pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 89,81 dengan target 88 dan capaiannya 102,06%. Pengukuran capaian dilakukan setiap triwulan.

Adapun berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator disertakan Foto/Dokumentasi Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya adalah sebagai berikut :



Gambar 6. Nilai SKM Badan Mutu KKP Palangka Raya selama Triwulan II tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 09

IK 09. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

Kontribusi Badan Mutu KKP Palangka Raya dalam memenuhi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup UPT KIPM Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	Realisasi	% CAPAIAN
SK 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	75	81,47	108,63%

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 81,47 dengan target 81 dan capaiannya adalah 100%.

1. Rapat bulanan pembahasan peningkatan capaian kinerja terkait pencapaian

IP ASN tahun 2025 dan pendelegasian tugas untuk mengikuti diklat sesuai tupoksi masing-masing ASN



IP ASN 2025 Dashboard Esekun Pegawai FAQ IP ASN 2024

palangka

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
1	STASUN/KPM PALANGKARAYA	8	20,62	82,48 %	30,84	77,1 %	25	83,33 %	5	100 %	81,47	TINGGI

Silakan ketik NIP atau Nama

Troubleshooting permasalahan IP-ASN bisa dicari pada halaman berikut: [lap.troubleshooting-permasalahan-ip-asn](#)

#	Nama	Kualifikasi		Kompetensi				Kinerja		Disiplin		TOTAL	Keterangan		
		Tingkat Pendidikan	IP	Diklat PIM	Diklat Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20 JP	IP	Predikat Kinerja	Hukuman Disiplin	IP				
1	MHAREJO	S-2	25	20	10	-	-	0	30	BAK	25	0	5	85	TINGGI
2	MARSELINA ISRAMAWARDANI	S-1	20	20	-	10	-	5	35	BAK	25	0	5	85	TINGGI
3	JOHN LIM HANSEN	S-1	20	20	-	0	-	4,25	24,25	BAK	25	0	5	74,25	SEDANG
4	PRYO BUCHI ADMOKO	D-III	20	20	10	-	-	15	31,5	BAK	25	0	5	81,5	TINGGI
5	JUDIN	D-III/VSMA	20	20	-	-	10	5	35	BAK	25	0	5	85	TINGGI
6	AKHMAD FAKHRIZAL NUR	S-2	25	20	-	10	-	5	35	BAK	25	0	5	90	TINGGI
7	FATMAH	S-1	25	20	-	10	-	1	31	BAK	25	0	5	86	TINGGI
8	KUSNI	D-III	10	20	-	0	-	5	25	BAK	25	0	5	65	BENDAH

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 11

IK 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

Kontribusi Badan Mutu KKP Palangka Raya dalam memenuhi Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan lingkup UPT KIPM Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	Realisasi	% CAPAIAN
SK 3.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya	85	100	117,6%

Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP. Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang di manfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 100% dengan target 85% dan capaiannya adalah 117,6%.



3.5. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pada tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip **penghematan** dan **efisiensi**, bahkan beberapa kegiatan tidak tersedia anggaran atau jauh dibawah standar biaya umum (SBU), namun dengan komitmen dan pengabdian seluruh pegawai, kegiatan-kegiatan tetap terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Badan Mutu KKP Palangka Raya meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 9. Jenis belanja DIPA di UPTBadan Mutu KKP Palangka Raya tahun anggaran 2025 (Per 31 Desember 2024).

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	KET (%)
Belanja Pegawai	1.523.822.000,-	273.323.674,-	17,94%
Belanja Barang	1.787.385.000,-	324.279.597,-	18,14%
Belanja Modal	0,-	0,-	0,00%
TOTAL	3.311.207.000,-	597.603.271,-	18,05%

Dari kegiatan belanja Tahun 2025 di atas, pembiayaan berasal dari :

a. Anggaran Rupiah Murni	: Rp.	3.161.659.000,-
b. Anggaran PNBP	: Rp.	149.548.000,-
JUMLAH	: Rp.	3.311.207.000,-

Selama tahun 2025, total anggaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sebesar **Rp. 3.311.207.000,-** (Tiga milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dan selama Triwulan II tahun 2025 telah terealisasi sebesar **Rp 597.603.271,-** (Lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa persentase realisasi Triwulan II tahun 2025 sebesar 18,05%.

Tabel 10. Penyerapan anggaran berdasarkan kegiatan pada Triwulan II tahun 2025

No	Kode>Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup BPPMHKP	2.543.125.000,-	163.431.466,-	2.379.693.534,-	6,43
2	Manajemen Mutu	77.464.000,-	0.00	77.464.000,-	0.00
3	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	42.821.000,-	0.00	42.821.000,-	0.00
	TOTAL	2.663.410.000,-	163.431.466,-	2.499.978.534,-	6,43

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Tahun 2025, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Mutu KKP Palangka Raya telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Keberhasilan pelaksanaan pengembangan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai Badan Mutu KKP Palangka Raya dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Berbagai hambatan dan kendala pada pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II tahun anggaran 2025 telah diantisipasi melalui monitoring dan evaluasi setiap triwulan dalam pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Mutu KKP Palangka Raya. Di samping itu juga dilakukan koordinasi secara intensif dengan BPPMHKP dalam rangka percepatan penyerapan anggaran.

Laporan kinerja Badan Mutu KKP Palangka Raya Triwulan II Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis kepada pemangku kepentingan dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuk pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, laporan ini juga dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di lingkungan Badan Mutu KKP Palangka Raya pada masa datang.

Pencapaian terhadap target sasaran strategis kinerja Badan Mutu KKP Palangka Raya permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan dan program di masa yang akan datang. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan analisis secara komprehensif terhadap capaian sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja utama Tahun 2025, dengan demikian diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, dimana hal ini merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan dari Laporan Kinerja Tahun 2025.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU dan IKM Badan Mutu KKP Palangka Raya yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025, antara lain:

1. Masih harus selalu update Rencana Penarikan Dana yang mempengaruhi Indikator deviasi Halaman III DIPA;
2. Belum tercapainya Target IKU “UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Badan Mutu KKP Palangka Raya”.

4.1. Rekomendasi & Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Mutu KKP Palangka Raya pada Triwulan II tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

Tabel 11. Rekomendasi dan Hasil tindak lanjut rekomendasi terhadap IKK oleh Badan Mutu KKP Palangka Raya selama Triwulan II tahun 2025.

No. IKK	Uraian IKK		
1	1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya		
	Rekomendasi	Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi	Penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembuatan Grup WA CBIB untuk Kabupaten PulangPisau ✓ Melakukan sosialisasi CBIB di beberapa Kabupaten di Kalimantan Tengah ✓ Telah dilaksanakannya pelatihan CPIB kapal sebanyak 15 orang di pelabuhan perikanan Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sudah dilakukan inspeksi CBIB kepada pembudidaya di Kab. Sukamara dan Kab. Kapuas. ✓ Sudah dilaksanakan zoom Bimbingan Teknis CPIB di atas kapal UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang, Seruyan, Kalimantan Tengah 	Timja Pengendalian dan Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2	2. Persentase Hasil Kelautan dan perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)		
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan sosialisasi dan asistensi penerbitan sertifikasi HACCP kepada UPI yang akan melakukan pengajuan sertifikat HACCP baru atau perpanjangan. ✓ Penyerahan sertifikat SKP secara langsung di Kabupaten Kapuas 	Melaksanakan penyerahan sertifikat SKP secara langsung di UPI yang telah terbit sertifikat SKP pada bulan Mei 2025 sebanyak 10 sertifikat	Inspektur Mutu yang ditunjuk
11	3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)		
	✓ -	-	Dukungan Manajerial
12	4. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (%)		

	✓ Melakukan pemantauan SIRUP apabila dilakukan Revisi DIPA.	✓ Telah dilakukan revisi RUP pada aplikasi SIRUP.	Operator SIRUP
14	5. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya (Nilai)		
	✓ Melakukan penilaian tiap unsur pelayanan di aplikasi SUSAN KKP	-	Pengendalian dan Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
09	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya		
	✓ Pendelegasian tugas untuk mengikuti diklat teknis / diklat umum / sosialisasi / webinar/e-learning sesuai tupoksi masing-masing ASN		Dukungan manajerial
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palangka Raya		
	✓ Melakukan pemantauan nilai rekomendasi dari aplikasi SIDAK KKP dari bulan Juli sampai September 2025	-	Dukungan manajerial